HARIAN
UNTUK UMUM
TERBIT SEJAK
01 MARET 2011
PENDIRI
ARDI, S.Si, Apt
EDISI: JUMAT
16 OKTOBER 2026

BUTON-BUTENG-BUSEL-BUTUR-WAKATOBI-MUNA-MUBAR
KOLAKA-BOMBANA-KENDARI-BAUBAU

Baubau Post

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

www.baubaupost.com
www.durasitimes.com

ECERAN Rp 5.000 | BERLANGGANAN RP 100.000/ BULAN | LANGGANAN & IKLAN HUBUNGI HP/WA: 082160543989

Kabut Asap Selimuti Buton Selatan, Dinkes Bagaikan 400 Masker



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Buton dalam beberapa pekan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Buton Selatan mengambil langkah cepat untuk melindungi masyarakat. Sebanyak 400 lembar masker dibagikan kepada masyarakat di jalan poros masiri Pantai Boti dan pelabuhan Bandar Batauga, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan melalui Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Sri Novianti, mengatakan pembagian masker yang dilaksanakan selama satu. Pembagian masker tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

"Jadi, 400 masker ini kami bagi dua tempat yakni Pantai Boti dan Pelabuhan Bandar Batauga masing-masing 200 tiap titik," tutur Sri Novianti saat di wawancara pada awak media Baubau Post, Rabu (14/10/2026).

Bidang Kesmas menambahkan, pembagian masker tak hanya dilakukan oleh Dinkes tetapi dilaksanakan juga di setiap Puskesmas se-Keca-

Lanjut ke Hal: 7



Laporan: PRASETIO M, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP - Pemerintah Kota Baubau mengimbau masyarakat menggunakan masker dan membatasi aktivitas di luar rumah menyusul kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut selama beberapa pekan terakhir. Pemerintah juga meminta orang tua mengawasi aktivitas anak-anak guna mengurangi risiko gangguan pernapasan, sembari menyiapkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengetahui sumber serta perkembangan kondisi asap.

Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darussalam, S.Sos., M.Si., mengatakan imbauan telah disampaikan melalui surat kepada para lurah agar diteruskan kepada warga di wilayah masing-masing. Pemerintah meminta setiap

Lanjut ke Hal: 7

BMKG Betoambari Peringatkan Potensi Kabut Asap di Baubau dan Sekitarnya hingga 17 Oktober



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Stasiun Meteorologi Kelas III Betoambari Baubau memperingatkan potensi peningkatan pencemaran udara akibat partikel debu halus dan kabut asap di wilayah Kepulauan Kota Baubau dan sekitarnya pada 13-17 Oktober 2026.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Betoambari Baubau, Adi Istyono, S.Geo., menyam-

Lanjut ke Hal: 7

Persiapan Operasional RSUD Buton Tengah, Bupati Dr Azhari Bahas Kekurangan Fasilitas dengan Bappenas



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemenuhan fasilitas dan penguatan tata kelola menjadi fokus pembahasan persiapan pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Tengah saat Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, S.STP., M.Si., menerima tim Kementerian PPN/ Bappenas dan Kementerian Kesehatan di ruang kerja bupati, Selasa (13/10/2026). Pertemuan tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan rumah sakit agar siap memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

Bupati Azhari berharap pemerintah pusat membantu melengkapi berbagai kebutuhan yang masih belum terpenuhi. Ia menargetkan RSUD Buton Tengah dapat beroperasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan tata kelola profesional dan berorientasi pada mutu pelayanan. "Semoga pemerintah pusat dapat melengkapi apa yang masih kurang di RSUD Buteng, menuju RSUD Buteng yang akan beroperasi sebagai BLUD yang paripurna dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Buton Tengah," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah kendala dan kekurangan fasilitas yang masih membutuhkan perhatian. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya mematangkan kesiapan rumah sakit, termasuk memastikan kebutuhan penunjang pelayanan dan pengelolaan kelembagaan

Lanjut ke Hal: 7

Baubau Gelar Pasar Murah Sasar Delapan Kecamatan hingga 17 Oktober , Beras dan Cabai Jadi Komoditas Utama

Laporan: Prasetio M



BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau menggelar Pasar Murah pada 13-17 Oktober 2026 untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan yang menyasar delapan kecamatan ini menyediakan beras dan cabai bersubsidi sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi daerah.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Kota Baubau, Suarmawati, S.Si., M.Si., mengatakan beras dan cabai menjadi komoditas yang mendapat perhatian karena turut

Lanjut ke Hal: 7

SBY Berkelakar soal Batuk Prabowo, Rupiah dan Saham Jadi Sorotan



Prabowo mengundang Presiden dan Wapres terdahulu ke Istana Kepresidenan, Selasa (3/3) malam.Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disambut Presiden RI Prabowo Subianto saat bertamu ke Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melontarkan kelakar mengenai Presiden Prabowo Subianto dan sensitivitas pasar keuangan saat menyampaikan orasi ilmiah pada Dies Natalis ke-68 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (FISIP Unpad), Selasa (13/10). Dalam kesempatan itu, SBY berseloroh bahwa batuk Prabowo yang keras bisa membuat nilai tukar rupiah dan harga saham jatuh.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika SBY menceritakan kondisi dirinya yang sedang mengalami batuk. Ia mengawali orasi dengan meminta maaf kepada hadirin dan menegaskan bahwa materi yang disampaikannya bukan orasi politik.

SBY kemudian mengungkapkan bahwa batuk dapat mengganggu orang-orang di sekitarnya. Bahkan, kegiatan melukis yang kini ditekuninya juga berpotensi terganggu apabila ia tiba-tiba batuk saat sedang mengerjakan lukisan.

"Kalau saya batuk yang suka terganggu kiri-kanan saya, kalau saya melukis terus tiba-tiba batuk batuk pasti lukisannya rusak itu, tapi aman karena saya seorang seniman sekarang," ujar SBY dalam orasi yang dapat diakses melalui kanal YouTube FISIP Unpad.

Dari cerita tersebut, SBY mengalihkan pembicaraan kepada Prabowo. Dengan nada bercanda, ia menyinggung kemungkinan reaksi pasar keuangan terhadap peristiwa yang berkaitan dengan kepala negara.

"Kalau yang batuk Pak Prabowo, hati-hati. Kalau batuknya keras, nilai tukar rupiah dan saham bisa jatuh," kata SBY.

Di balik kelakar itu, SBY menyampaikan harapan agar Prabowo senantiasa diberikan kesehatan sehingga mampu menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Ia menempatkan kesehatan presiden sebagai hal penting bagi keberlangsungan kepemimpinan nasional.

"Kita doakan presiden kita sehat sehingga bisa memimpin negara dengan baik," tutur Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut.

Dalam konteks ekonomi, pernyataan SBY menyinggung hubungan antara sentimen politik dan pasar keuangan. Investor dapat mencermati pernyataan pejabat, arah kebijakan pemerintah, dan tingkat ketidakpastian politik ketika mengambil keputusan investasi. Namun, candaan itu bukan bukti bahwa kondisi kesehatan presiden secara langsung menyebabkan perubahan nilai tukar rupiah atau harga saham.

Indonesia pernah mengalami gejolak keuangan besar pada krisis moneter 1997-1998. Krisis yang bermula di Thailand pada Juli 1997 menyebar ke sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia, dan diikuti tekanan berat terhadap rupiah, sektor perbankan, serta pasar saham. Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana kerentanan ekonomi dan hilangnya kepercayaan dapat memperburuk tekanan di pasar keuangan.

Di tingkat internasional, peristiwa Black Monday pada 19 Oktober 1987 menjadi salah satu catatan penting dalam sejarah pasar modal. Indeks Dow Jones Industrial Average di Amerika Serikat merosot 22,6 persen dalam satu hari perdagangan. Kejadian itu menunjukkan bahwa gejolak pasar dapat berkembang akibat kombinasi tekanan jual, perilaku investor, dan keterkaitan antarpasar.

Meski demikian, pergerakan rupiah dan saham tidak ditentukan oleh satu faktor saja. Suku bunga, inflasi, arus modal, kondisi ekonomi global, serta ekspektasi terhadap kebijakan pemerintah dan bank sentral turut memengaruhi keputusan pelaku pasar.

Dalam konstelasi politik nasional, Partai Demokrat merupakan salah satu partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah kader Demokrat bergabung dalam kabinet, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra sulung SBY sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.(*)

Eks Komisi II DPR Siapkan Penelusuran Dugaan Pasal Gibran dalam PKPU 2023

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-Polemik Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 kembali menjadi sorotan setelah mantan anggota Komisi II DPR RI periode 2019â€“2024 berencana berkumpul untuk menelusuri proses pembentukan ketentuan tersebut. Penelusuran itu diarahkan untuk memastikan apakah aturan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pernah dibahas dan disepakati dalam rapat konsultasi DPR bersama KPU.

Anggota Komisi II DPR periode tersebut, Guspardi Gaus, mengatakan rencana pertemuan itu digagas Ahmad Doli Kurnia, yang saat pembahasan PKPU menjabat Ketua Komisi II DPR. Menurut Guspardi, dokumentasi rapat dengar pendapat (RDP) dapat digunakan untuk memeriksa kembali proses pembahasan ketentuan yang oleh sejumlah pihak dijuluki Pasal Gibran Banget.

"Mungkin [pertemuan] dalam minggu-minggu ini kita akan..., jadi kita bedah. Itu gampang itu, setiap RDP kan ada dokumentasinya," ujar Guspardi saat dihubungi wartawan pada Selasa (13/10).

Guspardi menyebut ada dua kemungkinan yang perlu ditelusuri. Pertama, pasal tersebut tidak tercantum dalam daftar materi yang dibahas bersama DPR. Kedua, ketentuan itu masuk dalam dokumen pembahasan, tetapi tidak dibicarakan secara terbuka dalam rapat. Ia menilai risalah rapat, rancangan peraturan, dan kesimpulan konsultasi menjadi dokumen penting untuk memastikan proses yang sebenarnya.

Persoalan tersebut juga memunculkan perbedaan keterangan antara Ahmad Doli Kurnia dan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Doli sebelumnya menyatakan tidak mengetahui keberadaan pasal tersebut dalam pembahasan, sedangkan Hasyim menyebut Komisi II DPR mengetahui ketentuan itu dan turut terlibat dalam proses konsultasi. Perbedaan keterangan tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pemeriksaan dokumen resmi.

Hasyim, dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 1 Oktober 2026, membantah adanya kesengajaan untuk meloloskan calon tertentu melalui ketentuan tersebut. Ia menyatakan pasal itu muncul berdasarkan masukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait persoalan dokumen penyetaraan pendidikan. Keterangan tersebut merupakan penjelasan Hasyim dalam persidangan, sementara dugaan para pemohon mengenai proses pembentukan aturan tetap menjadi bagian dari perkara yang diperiksa.

Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Peraturan itu ditetapkan pada 9 Oktober 2023 dan diundangkan pada 13 Oktober 2023. Ketentuan tersebut menjadi pokok perdebatan karena dinilai sejumlah pemohon berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam perkara yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak lainnya, MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Putusan tersebut mengakhiri pemeriksaan perkara itu, tetapi amar tidak dapat diterimanya permohonan harus dibedakan dari putusan yang mengabulkan atau menolak pokok dalil pemohon.

Guspardi juga mempertanyakan apakah ketentuan tersebut telah melalui uji publik sebagaimana yang ia nilai perlu dilakukan dalam penyusunan peraturan. Menurut dia, keterbukaan proses konsultasi dan kesempatan masyarakat memberikan masukan merupakan bagian penting dari penyusunan regulasi. Meski demikian, klaim mengenai tidak adanya pembahasan atau uji publik perlu diuji melalui dokumen dan keterangan resmi, bukan semata-mata berdasarkan pernyataan salah satu pihak.

Secara historis, perdebatan aturan pencalonan Pilpres 2024 juga berlangsung setelah MK membacakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023 mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan itu mengubah pemaknaan batas usia dengan memberikan pengecualian bagi orang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Perubahan persyaratan usia tersebut berbeda secara hukum dari persoalan dokumen pendidikan yang kini diperdebatkan, tetapi keduanya menjadi bagian dari dinamika regulasi pencalonan menjelang Pilpres 2024.

Dalam konteks internasional, International IDEA melalui pedoman International Electoral Standards yang diterbitkan pada 2002 menekankan pentingnya kerangka hukum pemilu yang konsisten, dapat diandalkan, akurat, dan profesional. Prinsip tersebut relevan sebagai konteks untuk menilai pentingnya dokumentasi, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyusunan aturan pemilu. Karena itu, penelusuran dokumen rapat DPR dan KPU diharapkan dapat memperjelas apakah Pasal 18 ayat (3) telah melalui prosedur pembahasan yang semestinya. (*)

Terima Kunker Komisi IX DPR RI, Gubernur ASR Usulkan Ambulans Laut, Delapan Kabupaten Kepulauan Sultra Jadi Prioritas



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengupayakan pengadaan ambulans laut untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kepulauan. Program ini menjadi salah satu agenda yang dipaparkan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) saat menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Jumat (9/10/2026).

ASR menegaskan, karakter geografis Sultra memerlukan sistem pelayanan kesehatan yang tidak hanya bergantung pada transportasi darat. Dari 17 kabupaten/kota di provinsi tersebut, delapan kabupaten berada di wilayah kepulauan yang membutuhkan dukungan transportasi medis untuk menjangkau fasilitas rujukan.

“Karakter wilayah Sulawesi Tenggara sebagai daerah kepulauan tidak bisa hanya mengandalkan ambulans darat. Kita tengah mengupayakan secara serius pengadaan layanan ambulans laut,” kata ASR dalam pertemuan yang berlangsung pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 itu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 yang dipaparkan gubernur, jumlah penduduk Sultra mencapai 2,83 juta jiwa. Pemerintah daerah menilai pemerataan layanan kesehatan menjadi kebutuhan penting untuk menjangkau masyarakat di wilayah daratan dan kepulauan. Selain merencanakan ambulans laut, Pemprov Sultra memperkuat pelayanan di puskesmas dan posyandu, mengoptimalkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta mengendalikan penyakit. Pemerintah juga menargetkan cakupan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan mencapai 89 persen pada akhir 2026.

Pada layanan rujukan, Pemprov Sultra mematangkan rencana pembangunan gedung layanan delapan lantai di RSUD Bahteramas yang ditargetkan terealisasi pada 2027. Peningkatan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Persoalan akses kesehatan di wilayah kepulauan bukan hanya dihadapi Sultra. Secara nasional, Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 menegaskan laut di antara dan di dalam kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Dalam perkembangannya, tantangan geografis tetap memengaruhi pemerataan pelayanan publik. Pada 2023, Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit Kapal sebagai landasan penyelenggaraan layanan rumah sakit di atas kapal. Di tingkat internasional, pengalaman pelayanan kesehatan di negara-negara kepulauan juga menunjukkan pentingnya pendekatan transportasi dan layanan medis yang sesuai dengan kondisi geografis.

Di luar sektor kesehatan, ASR menyoroti peningkatan kompetensi sumber daya manusia lokal melalui pelatihan vokasi untuk menjawab kebutuhan industri, termasuk kawasan industri Pomalaa. Pemerintah daerah juga memperhatikan harmonisasi hubungan industrial antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing (TKA), pemantauan sistem pengupahan, serta perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja non-ASN, pekerja informal, dan kelompok pekerja rentan.

“Kita mungkin tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan rakyat dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, atau bahkan satu tahun. Tetapi kita harus mengupayakan agar setiap harinya, sebagai pemegang amanah, selalu ada persoalan rakyat yang berhasil kita selesaikan,” ujar ASR. Ia menyatakan pemerintah provinsi siap menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Komisi IX DPR RI.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., bersama Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, anggota komisi, serta perwakilan kementerian dan lembaga mitra kerja. Pertemuan itu menjadi forum untuk membahas kondisi faktual dan menyerap aspirasi masyarakat Sultra terkait kesehatan, pemenuhan gizi, ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan kependudukan.

Nihayatul menyambut baik rencana ambulans laut yang diajukan Pemprov Sultra. Menurut dia, layanan tersebut dapat membantu mengatasi kendala geografis dalam penanganan medis darurat, sehingga masyarakat kepulauan memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan rujukan. Ia juga menyoroti pengesahan Undang-Undang Pelindungan Pekerja dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026, yang menurutnya mencakup perlindungan pekerja rentan, jaminan sosial, dana cadangan pesangon, pemagangan, dan kepastian hukum. Hasil penyerapan aspirasi itu diharapkan menjadi bahan perumusan kebijakan nasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sultra. (*)

ASR Kawal 10.742 Bedah Rumah di Sultra, Rp1,8 Triliun Berpotensi Berputar



Laporan: Lisna

SULTRA, BP- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka meminta bupati dan wali kota memastikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026 tepat sasaran. Sultra memperoleh alokasi 10.742 unit dari pemerintah pusat, di tengah persoalan 114.917 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih membutuhkan penanganan. Program tersebut juga diperkirakan mendorong perputaran dana sektor perumahan hingga Rp1,8 triliun di daerah.

Arahan itu disampaikan Andi Sumangerukka, yang akrab disapa ASR, saat membuka rapat koordinasi pelaksanaan BSPS, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Kredit Program Perumahan (KPP/KUR Perumahan) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (12/10/2026). Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota terlibat aktif dalam pengawasan penerima bantuan, penyelesaian administrasi, serta penanganan kendala teknis dan status lahan.

“Kalau ingin menyelesaikan masalah kesejahteraan, maka kita harus memulai dari rumah. Maka selesaikanlah dulu rumah,” kata ASR. Menurut dia, hunian layak merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan bantuan diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria dan benar-benar membutuhkan.

Selain alokasi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sultra menyediakan anggaran Rp30 miliar melalui APBD 2026 untuk menangani 602 unit rumah di 17 kabupaten dan kota. Data verifikasi menunjukkan 12.463 unit telah diperiksa di lapangan. Dari jumlah tersebut, 8.980 unit atau 72,05 persen calon penerima bantuan telah direkomendasikan, sedangkan 7.814 unit telah mencapai tahap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (SK PPK).

ASR juga meminta percepatan tindak lanjut komitmen pembiayaan dari sektor perbankan. Ia secara khusus mendorong Bank Sultra menindaklanjuti dana Rp10 miliar yang telah masuk dan meminta bank lainnya merealisasikan komitmen minimal 150 rumah. Apabila persoalan pelaksanaan melampaui kewenangan kabupaten dan kota, pemerintah daerah diminta segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar dapat diteruskan kepada pemerintah pusat.

Dari sisi pembiayaan, penyaluran FLPP di Sultra telah mencapai 5.760 unit dengan nilai sekitar Rp717,5 miliar melalui delapan bank penyalur dan 13 asosiasi pengembang. Sementara itu, realisasi KPP tercatat Rp277,51 miliar atau 54,74 persen dari target Rp506,96 miliar. Dukungan prasarana, sarana, dan utilitas umum juga telah disalurkan untuk empat lokasi perumahan dengan total 248 unit dan nilai kontrak Rp1,3 miliar.

Program perumahan tersebut turut memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data rapat, kegiatan bedah rumah di Sultra telah menyerap 21.484 tenaga kerja dan melibatkan 359 tenaga pendamping masyarakat. ASR menilai aktivitas pembangunan dapat meningkatkan pendapatan pekerja, menggerakkan usaha bahan bangunan, serta memperluas perputaran ekonomi di tingkat lokal. Ia memperkirakan nilai perputaran dana dari berbagai program perumahan di Sultra mencapai sekitar Rp1,8 triliun.

“Dengan adanya pembangunan rumah ini, maka ini adalah lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita. Kalau pekerja memiliki penghasilan, ekonomi yang ada di daerah akan bergerak,” ujarnya. Ia meminta rapat teknis lanjutan menghasilkan solusi konkret atas hambatan di lapangan sehingga pelaksanaan program tidak berhenti pada kesepakatan administratif.

Persoalan hunian layak di Sultra merupakan bagian dari tantangan perumahan nasional yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Secara historis, Kongres Perumahan Sehat pertama di Bandung pada 25â€“30 Agustus 1950 menjadi salah satu tonggak pembangunan perumahan Indonesia. Program bantuan perbaikan rumah kemudian berkembang melalui berbagai kebijakan, termasuk skema bantuan perumahan swadaya yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam perkembangan terbaru, pemerintah pusat meluncurkan BSPS 2026 dengan kuota nasional 400.000 unit, meningkat dari 45.000 unit pada 2025. Secara terpisah, data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat bahwa pada akhir 2025 terdapat sekitar 29,17 juta keluarga dalam kategori backlog perumahan, yang mencakup persoalan kepemilikan maupun kelayakan hunian. Data nasional tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan intervensi perumahan, meskipun cakupan indikatornya berbeda dari data RTLH Sultra. Bedah Rumah di Sultra, Rp1,8 Triliun Berpotensi Berputar(*)

Jambore PKK di Wakatobi, 53 Kader Buton Tengah Siap Berbagi Inovasi Keluarga di HKG-54 Sulawesi Tenggara



Laporan: Ardi

WAKATOBI, BP- Sebanyak 53 anggota kontingen Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Buton Tengah tiba di Kabupaten Wakatobi, Selasa (13/10/2026), untuk mengikuti Jambore PKK dan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlangsung pada 14-16 Oktober 2026.

Keikutsertaan kontingen tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kader, memperluas pertukaran pengalaman, dan mendorong inovasi program pemberdayaan keluarga. Kegiatan tingkat provinsi itu mempertemukan kader PKK dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara dalam agenda edukatif dan kegiatan kebersamaan.

Kontingen Buton Tengah dipimpin Staf Ahli TP-PKK Kabupaten Buton Tengah, Kartini Adam Basan. Setibanya di Wakatobi, rombongan disambut Ketua TP-PKK Kabupaten Wakatobi, Ny. Hj. Eliati Haliana, S.K.M., di Aula Maritime Center Wakatobi.

Dalam penyambutan tersebut, Eliati mengapresiasi kehadiran rombongan dari Buton Tengah. Ia berharap pertemuan antarkader tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga menghasilkan pertukaran gagasan yang bermanfaat bagi pelaksanaan program PKK di daerah masing-masing.

"Jambore PKK dan HKG ke-54 ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, memperkuat sinergi kader, serta bertukar pengalaman dan inovasi dalam mendukung pemberdayaan keluarga," demikian pesan yang disampaikan Eliati dalam penyambutan kontingen.

Kartini Adam Basan menyampaikan terima kasih atas sambutan tuan rumah. Ia menegaskan kesiapan seluruh anggota kontingen Buton Tengah untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari tersebut.

Agenda Jambore PKK dan HKG ke-54 diharapkan menjadi ruang pembelajaran bersama bagi kader untuk mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui interaksi antardaerah, pengalaman dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan keluarga dapat dibagikan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

Secara historis, gerakan PKK berakar pada upaya pembangunan keluarga yang berkembang di Indonesia sejak 1957 melalui kegiatan pendidikan kesejahteraan keluarga. Gerakan tersebut kemudian berkembang menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan selanjutnya dikenal sebagai Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Dalam perkembangannya, PKK menjadi gerakan masyarakat yang mendorong keterlibatan keluarga dalam pembangunan.

Pada tingkat nasional, penguatan gerakan PKK berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan keluarga, pendidikan, ketahanan pangan rumah tangga, dan kesejahteraan sosial. Peran tersebut membuat kegiatan antarkader tidak hanya berorientasi pada pertemuan organisasi, tetapi juga pada pengembangan praktik pemberdayaan yang dapat diterapkan di masyarakat.

Secara internasional, pemberdayaan keluarga juga sejalan dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang disepakati negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015. Agenda tersebut mencakup penghapusan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, serta pembangunan masyarakat yang inklusif. Keselarasan ini merupakan konteks kebijakan yang relevan, bukan bukti bahwa kegiatan Jambore PKK di Wakatobi secara resmi menjadi bagian dari program PBB.

Bagi TP-PKK Buton Tengah, partisipasi dalam kegiatan tingkat provinsi tersebut diharapkan memperkuat jejaring antarkader sekaligus membuka peluang penerapan gagasan baru dalam program kerja daerah. Manfaat kegiatan pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan kader menerjemahkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh menjadi kegiatan nyata di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Jambore PKK dan HKG ke-54 di Wakatobi berlangsung pada 14-16 Oktober 2026 dengan semangat kolaborasi dan penguatan peran kader. Kehadiran 53 anggota kontingen Buton Tengah menjadi bagian dari upaya bersama memperkuat pemberdayaan keluarga dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara. (*)

Bupati Buton Alvin Akawajiya bersama Forkompimda Perkuat Pengamanan Pasca konflik Takimpo-Kombeli



Laporan:La Harman

BUTON, BAUBAU POST, BP- Pemerintah Kabupaten Buton bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat pengamanan wilayah Kelurahan Takimpo dan Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, menyusul perkelahian antarkelompok warga. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan ke Pos Satkamling Takimpo-Kombel Bersatu pada Jumat, 9 Oktober 2026, sekaligus mendorong penyelesaian konflik melalui komunikasi, pembinaan masyarakat, dan penegakan hukum.

Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., bersama jajaran Forkopimda memeriksa kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta pelaksanaan tugas pengamanan di pos bersama. Kehadiran aparat di wilayah perbatasan kedua kelurahan diharapkan mampu mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memulihkan rasa aman warga.

Dalam kegiatan itu hadir Kapolres Buton AKBP Ali Rais Ndraha, S.H., S.I.K., M.M.Tr.; Dandim 1413/Buton Letkol Inf. Yoni, S.Hub.Int.; Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.; Sekretaris Daerah Kabupaten Buton La Ode Syamsuddin, S.Pd., M.Si.; serta Wakapolres Buton Kompol Yulianus, S.Si. Turut hadir unsur pemerintah daerah, pejabat utama Polres Buton, personel TNI-Polri, Satpol PP, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dari kedua kelurahan.

Bupati Alvin menekankan bahwa pemulihan keamanan tidak cukup hanya mengandalkan penjagaan aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga dan tokoh masyarakat. Ia meminta orang tua meningkatkan pengawasan serta pembinaan terhadap anak-anak agar tidak terlibat dalam tindakan yang berpotensi memicu konflik. Bupati juga berharap dugaan penjarahan dan perusakan dalam rangkaian peristiwa tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

"Orang tua berperan penting dalam mengawasi dan membina anak-anak agar tidak terlibat dalam tindakan yang dapat memicu konflik," kata Alvin.

Kapolres Buton menyatakan kunjungan Forkopimda merupakan bentuk perhatian dan dukungan kepada personel yang bertugas di pos bersama. Pos tersebut direncanakan diresmikan pada 15 Oktober 2026 sebagai Posko Bersama Satkamling Takimpo-Kombel Bersatu. Ia mengajak masyarakat kedua kelurahan berpartisipasi dalam penjagaan lingkungan bersama aparat TNI-Polri, menjaga persaudaraan, serta mengutamakan penyelesaian masalah melalui komunikasi dan mekanisme hukum.

"Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat," ujar Kapolres.

Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Ivan Budi Hartanto mengapresiasi pembentukan posko bersama sebagai langkah memperkuat keamanan lingkungan dan membangun kembali kepercayaan warga. Ia mendorong tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda mengarahkan generasi muda pada kegiatan yang positif dan produktif. Komunikasi, silaturahmi, serta musyawarah dinilai penting untuk mencegah persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Dandim 1413/Buton Letkol Inf. Yoni menekankan perlunya pembinaan masyarakat secara terukur apabila pendekatan melalui orang tua, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan aparatur setempat belum membuahkan hasil. Ia mengingatkan agar perkelahian yang berpotensi berkembang menjadi tawuran antarkelurahan tidak dibiarkan. Para Bintara Pembina Desa (Babinsa) diharapkan terus melakukan pembinaan di wilayah masing-masing.

Sebagai tindak lanjut, Forkopimda menggelar rapat bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan unsur terkait dari Kelurahan Takimpo dan Kelurahan Kombeli. Pertemuan itu membahas langkah menjaga stabilitas keamanan serta merumuskan penyelesaian masalah secara damai. Pemerintah daerah bersama unsur keamanan juga menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan agar upaya pencegahan tidak berhenti pada penjagaan posko.

Penguatan keamanan berbasis masyarakat bukan hal baru. Di Indonesia, tradisi ronda dan sistem keamanan lingkungan berkembang sebagai bentuk partisipasi warga dalam menjaga permukiman. Dalam perkembangannya, sistem keamanan lingkungan atau siskamling dilembagakan secara lebih luas pada era Orde Baru. Di tingkat internasional, pendekatan community policing juga dikembangkan untuk memperkuat kemitraan polisi dan masyarakat; Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menempatkan keterlibatan masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam pencegahan kejahatan.

Melalui penguatan Posko Bersama Satkamling Takimpo-Kombel Bersatu, Forkopimda Kabupaten Buton berharap keamanan di Pasarwajo kembali terjaga dan hubungan sosial warga kedua kelurahan semakin pulih. Keberhasilan upaya tersebut akan bergantung pada konsistensi pengamanan, penyelesaian persoalan sesuai hukum, serta kesediaan seluruh elemen masyarakat membangun kembali persaudaraan dan menjaga perdamaian.(*)

HUT ke-485 Baubau, Wali Kota H Yusran Fahim Bakti Sosial di Kotamara, Tekankan Pelayanan bagi Kelompok Rentan



Peliput: Andina L

BAUBAU, BP, BP- Pemerintah Kota Baubau memanfaatkan peringatan Hari Jadi ke-485 Baubau dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom untuk mendorong peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui bakti sosial di Kawasan Kotamara, Sabtu (10/10/2026). Kegiatan yang diinisiasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Baubau itu menghadirkan pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi dokter spesialis, pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD), serta donor darah sukarela.

Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE, yang membuka kegiatan tersebut, menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat. Menurut dia, kesehatan tidak hanya berkaitan dengan penanganan penyakit, tetapi juga menentukan kemampuan keluarga dalam bekerja, belajar, dan menjalankan aktivitas sehari-hari.

"Ketika orang tua sehat, mereka dapat bekerja dan menghidupi keluarganya. Ketika anak-anak sehat, mereka dapat belajar, bermain, dan mengejar cita-citanya," ujar Yusran.

Ia mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan yang tersedia untuk memeriksa kondisi kesehatan dan berkonsultasi dengan tenaga medis. Warga juga diingatkan agar tidak menunda pengobatan sampai kondisi memburuk, mengingat pemeriksaan dan penanganan sejak dini merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan.

Selain pelayanan medis, pelatihan BHD menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut. Pengetahuan pertolongan pertama dinilai penting karena kondisi darurat dapat terjadi di rumah, tempat kerja, maupun ruang publik sebelum tenaga medis profesional tiba. Melalui pelatihan ini, masyarakat diharapkan memiliki bekal dasar untuk memberikan pertolongan secara tepat sesuai kemampuan dan prosedur yang diajarkan.

Pada kesempatan yang sama, Yusran mengajak masyarakat yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk mendonorkan darah. Ia menilai partisipasi dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk solidaritas sosial yang dapat membantu pasien yang membutuhkan transfusi darah.

"Setiap kantong darah memberi harapan hidup nyata bagi pasien yang membutuhkan," demikian pesan yang disampaikan dalam ajakan donor darah tersebut.

Yusran juga menginstruksikan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan para camat agar aktif menyosialisasikan akses pelayanan kesehatan di wilayah masing-masing. Perhatian khusus diminta diberikan kepada kelompok rentan, terutama warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan keluarga prasejahtera, agar mereka tidak terabaikan dalam memperoleh informasi maupun pendampingan layanan.

Kepada manajemen RSUD Kota Baubau, dokter, perawat, dan tenaga medis yang bertugas, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas keterlibatan mereka. Ia berharap tenaga kesehatan terus memberikan pelayanan yang ramah, komunikatif, dan solutif sehingga masyarakat memperoleh pengalaman pelayanan yang baik ketika berobat.

Upaya memperluas akses kesehatan tersebut sejalan dengan perkembangan gagasan kesehatan sebagai hak dasar manusia di tingkat internasional. Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) diadopsi pada 22 Juli 1946 dan mulai berlaku pada 7 April 1948. Dokumen itu menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi sosial maupun ekonomi.

Dengan mengusung tema "Baubau Bangkit, Berbudaya dan Sejahtera", bakti sosial ini menjadi bagian dari peringatan hari jadi yang diarahkan pada kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah Kota Baubau berharap sinergi pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan warga dapat terus diperkuat agar pelayanan kesehatan semakin mudah diakses, khususnya oleh kelompok yang membutuhkan perhatian lebih.(*)

Kemenkes Siapkan Reformasi JKN, Pasien Bakal Dirujuk Sesuai Kompetensi RS

Laporan: Ardi

PALEMBANG, BP- Kementerian Kesehatan menyiapkan uji coba reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di empat daerah, yakni Muara Enim, Sumatera Selatan; Bandung; Makassar; dan Tulungagung. Pembaruan ini mencakup sistem rujukan berbasis kompetensi fasilitas kesehatan, standar ruang rawat inap, serta skema pembiayaan rumah sakit yang disesuaikan dengan kompleksitas kasus medis.

Uji coba direncanakan berlangsung selama 12 bulan dan akan dimulai setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pelaksanaan kebijakan tersebut masih bergantung pada terbitnya regulasi sebagai dasar penerapan.

Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan, dr. Obrin Parulian, menjelaskan bahwa sistem rujukan berbasis kompetensi atau Rujukan Berbasis Kompetensi Pelayanan (RBKP) dirancang agar pasien memperoleh penanganan sesuai kebutuhan medis, kemampuan fasilitas kesehatan, dan diagnosis yang ditegakkan.

"Pasien akan langsung dikirim ke fasilitas kesehatan terdekat yang kompetensinya sesuai dengan diagnosis medisnya," kata Obrin.

Melalui pendekatan tersebut, pasien tidak harus melewati seluruh tingkatan rumah sakit secara berurutan dari tipe D, C, B, hingga A. Namun, penentuan rujukan tetap harus mempertimbangkan kondisi pasien, kebutuhan klinis, serta kemampuan fasilitas kesehatan dalam memberikan penanganan yang diperlukan.

Pilar berikutnya ialah penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), yang menetapkan 12 kriteria standar ruang perawatan. Di antaranya, jumlah tempat tidur maksimal empat unit dalam satu kamar, ketersediaan oksigen sentral, fasilitas panggilan perawat, serta kamar mandi di dalam ruang perawatan. Standar ini ditujukan untuk memperbaiki kualitas dan kelayakan fasilitas rawat inap.

Adapun pilar ketiga adalah penggunaan Indonesian Diagnosis Related Groups (iDRG), yakni pendekatan pembiayaan yang mengelompokkan kasus berdasarkan diagnosis dan kompleksitas penanganan. Skema tersebut diharapkan membuat pembayaran klaim lebih mencerminkan kebutuhan sumber daya medis dalam menangani pasien.

Di Muara Enim, kesiapan fasilitas kesehatan telah dipetakan melalui peninjauan terhadap puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Puskesmas Tanjung Enim serta Klinik Rahayu Medika telah memiliki integrasi teknologi informasi dengan SATUSEHAT dan BPJS Kesehatan. Meski demikian, pengoptimalan pencatatan diagnosis melalui aplikasi PCare masih diperlukan.

Sementara itu, RSUD dr. H.M. Rabain, RS Bukit Asam Medika, dan RS Karunia Indah Medika menunjukkan kesiapan positif dalam pemetaan penerapan RBKP. RS Bukit Asam Medika dilaporkan telah memenuhi seluruh 12 kriteria KRIS. Ketiga rumah sakit tersebut juga masih menyempurnakan integrasi sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) dengan layanan terkait agar proses klaim dapat berjalan lebih terhubung dan otomatis.

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru meminta seluruh pihak menyampaikan kondisi fasilitas kesehatan secara terbuka, baik mengenai kesiapan maupun kekurangannya. "Jangan menutup-nutupi apa pun, baik kekurangan maupun kelebihannya. Ini penting agar kita bisa melakukan perbaikan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," ujarnya.

Kementerian Kesehatan akan mengevaluasi pelaksanaan dan kesiapan daerah setiap tiga bulan. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar perbaikan sebelum kebijakan diperluas ke tingkat nasional. Peneliti Divisi Riset dan Inovasi BPJS Kesehatan, Atmi Roseva, turut terlibat dalam rangkaian pembahasan reformasi tersebut. Di Muara Enim, penjabat bupati Sumarni menjadi salah satu unsur pemerintah daerah yang terkait dengan persiapan uji coba.

Secara historis, JKN mulai beroperasi pada 1 Januari 2014 sebagai bagian dari upaya memperluas perlindungan kesehatan masyarakat. Landasan sistem jaminan sosial nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, sedangkan penyelenggaraan BPJS diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Di tingkat internasional, Deklarasi Alma-Ata 1978 dan Deklarasi Astana 2018 menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan primer dan cakupan kesehatan semesta. Dalam konteks itu, reformasi JKN menjadi bagian dari upaya memperkuat akses, mutu, dan kesinambungan pelayanan kesehatan di Indonesia. (*)

PT FAREN GRAFIKA
Harian Pagi
Baubau Post
www.baubaupost.com

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetio
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun,Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupostt2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,

Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim
Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

OTT BNPB, KPK Sita Rp1,4 Miliar dan Logam Mulia; Rustian Pulang sebagai Saksi



Laporan: Amran

JAKARTA, BP- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di wilayah Jabodetabek, Selasa (13/10). Dalam operasi tersebut, penyidik menyita uang sekitar Rp1,4 miliar dan logam mulia. Sekretaris Utama BNPB Rustian, yang turut diamankan, diperbolehkan pulang setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (14/10), karena masih berstatus saksi.

Perkara tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan setelah KPK menggelar ekspose pada Selasa malam. Dalam forum itu, penyidik menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Namun, identitas mereka dan dugaan peran masing-masing belum diumumkan secara terbuka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah penyelidik mendalami informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan BNPB.

"Setelah penyelidikan perkara ini diputuskan naik ke tahap penyidikan pada forum ekspose tadi malam, kemudian penyidik menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka," kata Budi kepada wartawan.

Operasi penindakan berlangsung di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Menurut Budi, 14 orang yang diamankan berasal dari berbagai unsur, termasuk pejabat BNPB, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta pihak swasta. Informasi penangkapan itu disampaikan Budi di Yogyakarta pada Selasa malam.

Selain mengamankan sejumlah orang, penyidik membawa uang sekitar Rp1,4 miliar dan logam mulia sebagai barang bukti. KPK belum merinci asal-usul uang tersebut, jenis transaksi yang diduga bermasalah, ataupun keterkaitan setiap barang bukti dengan pihak-pihak yang diamankan.

Rustian meninggalkan Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 14.50 WIB, Rabu. Mengenakan kemeja putih, ia tidak menjawab pertanyaan wartawan mengenai pemeriksaannya maupun perkembangan perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.

Budi menyatakan, Rustian sebelumnya menjalani pemeriksaan intensif setelah diamankan dalam OTT. Namun, hingga pemeriksaan berakhir, status hukumnya masih sebagai saksi sehingga ia diperbolehkan meninggalkan gedung KPK.

"Sedangkan pihak-pihak yang sampai dengan saat ini status hukumnya sebagai saksi, maka dapat kembali," ujar Budi.

KPK menyatakan para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan ditahan. Meski demikian, lembaga tersebut belum memaparkan konstruksi lengkap perkara maupun dugaan tindak pidana yang melatarbelakangi OTT tersebut.

Perkara ini menjadi perhatian karena BNPB memiliki mandat strategis dalam koordinasi penanggulangan bencana nasional. Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana Indonesia ditandai dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB. Pembenahan sistem tersebut berlangsung setelah Indonesia mengalami berbagai bencana besar, termasuk tsunami Samudra Hindia pada 26 Desember 2004 yang menghantam Aceh dan sejumlah negara lain.

Dalam konteks internasional, upaya pemberantasan korupsi diperkuat melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention against Corruption atau UNCAC), yang diadopsi pada 2003 dan diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Hingga Rabu (14/10), KPK belum mengumumkan identitas seluruh tersangka maupun rincian lengkap perkara. Status Rustian sebagai saksi ketika dipulangkan merupakan status hukum pada saat itu dan tidak dengan sendirinya menentukan kemungkinan perkembangan proses hukum berikutnya.(*)

Rotasi Kilat Polri, Nanang Haryono Diganti dari Kapolresta Sleman Usai Sertijab



Laporan: Hadi

JAKARTA Jabatan Kapolresta Sleman kembali berganti setelah Kombes Nanang Haryono dimutasi menjadi Direktur Polisi Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Jambi melalui surat telegram Kapolri tertanggal 10 Oktober 2026. Pergantian itu berlangsung pada hari yang sama dengan pelaksanaan serah terima jabatan, sehingga penugasan Nanang di Sleman berlangsung sangat singkat. Posisi tersebut selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Dhimas Prasetyo.

Mutasi itu tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026. Sebelumnya, melalui Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, Nanang ditunjuk menggantikan Kombes Adhitya Panji Anom yang mendapat penugasan baru sebagai Kapolresta Bogor Kota.

Sebelum perubahan penugasan tersebut, Nanang telah mengikuti upacara serah terima jabatan yang dipimpin Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Irjen Langgeng Purnomo. Kegiatan itu dihadiri para pejabat utama Polda DIY serta Kapolres dan Kapolresta jajaran.

Polresta Sleman kemudian menggelar Welcome and Farewell Parade pada pukul 14.00 WIB. Namun, pada tanggal yang sama, telegram mutasi baru diterbitkan dan menetapkan penugasan Nanang sebagai Dirpolairud Polda Jambi. Pergantian tersebut sekaligus menempatkan Dhimas sebagai pejabat baru Kapolresta Sleman.

Kepala Bidang Humas Polda DIY, Kombes Ihsan, membenarkan perubahan tersebut. Ia menyatakan, mutasi dalam telegram terbaru juga mencakup dua pejabat lainnya di lingkungan Polda DIY. "Kapolresta Sleman Kombes Nanang Haryono diangkat sebagai Dir Polairud Polda Jambi. Penggantinya AKBP Dhimas Prasetyo, Kabagbekum Rolog Polda Metro Jaya," kata Ihsan.

Selain Kapolresta Sleman, rotasi menyasar jabatan Direktur Pembinaan Masyarakat Polda DIY. Kombes Oki Bagus Setiaji diangkat menjadi Direktur Lalu Lintas Polda Banten. Jabatan yang ditinggalkannya akan diisi Kombes Hendria Lesmana, yang sebelumnya menjabat Kapolresta Deli Serdang, Polda Sumatera Utara.

Perubahan lainnya terjadi pada jabatan Kapolres Kulonprogo. AKBP Ridho Hidayat diangkat menjadi Wakapolresta Sleman, sedangkan posisi Kapolres Kulonprogo dipercayakan kepada AKBP Agus Prihadinika, yang sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.

Menanggapi rotasi tersebut, Ihsan menegaskan bahwa keputusan mutasi merupakan kewenangan Mabes Polri. "Kebijakan rotasi dan mutasi ini merupakan kewenangan mutlak Mabes Polri berdasarkan kebutuhan dan penyegaran organisasi," ujarnya.

Secara nasional, mutasi merupakan salah satu mekanisme pengelolaan personel Polri untuk mengisi jabatan, mengembangkan karier, dan menyesuaikan kebutuhan organisasi. Meski demikian, alasan khusus yang mendasari perpindahan Nanang dalam waktu singkat belum dijelaskan secara terperinci oleh Polda DIY dalam keterangan yang tersedia.

Dalam konteks historis internasional, pengelolaan pimpinan kepolisian memiliki beragam pola, mulai dari promosi berdasarkan jenjang karier internal hingga perekrutan dari luar organisasi. Kajian National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine di Amerika Serikat pada 2022 membahas berbagai model tersebut serta pentingnya kompetensi, pendidikan, dan tata kelola dalam mendukung kepemimpinan kepolisian.

Pergantian Kapolresta Sleman dengan demikian menjadi bagian dari dinamika penataan jabatan di tubuh Polri. Namun, untuk menjelaskan mengapa Nanang kembali dimutasi setelah menjalani serah terima jabatan, diperlukan keterangan tambahan dari Mabes Polri atau Polda DIY mengenai pertimbangan spesifik di balik keputusan tersebut.(*)

Sekda La Ode Darussalam Ingatkan Bahaya Kabut Asap yang Masih Selimuti Baubau, Orang Tua Diminta Awasi Anak-anak dan Pakai Masker

keluarga meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kabut asap masih berlangsung.

"Kami dari pemerintah telah menyampaikan imbauan kepada seluruh masyarakat. Kami juga telah menyurati para lurah agar menyampaikan kepada warganya bahwa dengan kondisi asap ini, setiap keluarga diharapkan menggunakan masker," ujar Darussalam.

Selain penggunaan masker, warga diminta mengurangi kegiatan di luar rumah jika tidak mendesak. Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian karena aktivitas di luar ruangan dapat meningkatkan paparan asap. Masyarakat juga diharapkan segera mencari pertolongan medis apabila mengalami sesak napas atau keluhan kesehatan yang memburuk.

Hingga saat ini, pemerintah daerah belum memastikan sumber, penyebab, maupun perkiraan berakhirnya kabut asap. Karena itu, koordinasi dengan BMKG diperlukan untuk memperoleh informasi kondisi atmosfer dan pertimbangan penanganan sesuai perkembangan di lapangan.

"Kita belum mengetahui secara pasti asap ini berasal dari mana, apa sumber penyebabnya, dan sampai kapan akan berlangsung. Karena itu, kita perlu berkoordinasi dengan BMKG untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah," kata Darussalam.

Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau telah menyebarkan materi imbauan berbentuk selebaran digital melalui media sosial dan saluran komunikasi lainnya. Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas jangkauan informasi mengenai pencegahan dampak kabut asap. Adapun kemungkinan meliburkan sekolah belum diputuskan karena pemerintah masih memerlukan kajian mengenai dampak paparan asap terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, dengan melibatkan Dinas Kesehatan.

Kabut asap merupakan persoalan lingkungan yang berulang di Indonesia, terutama ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi pada musim kering. Dampaknya juga pernah meluas lintas negara di Asia Tenggara, termasuk dalam krisis asap 1997-1998. Pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya pemantauan kualitas udara, penyampaian informasi yang akurat, perlindungan kelompok rentan, serta koordinasi antarlembaga. Meski demikian, sumber kabut asap di Baubau saat ini belum dipastikan sehingga kaitannya dengan kebakaran hutan atau lahan tidak dapat disimpulkan sebelum tersedia data pendukung.(*)

Baubau Gelar Pasar Murah Sasar Delapan Kecamatan hingga 17 Oktober , Beras dan Cabai Jadi Komoditas Utama

memengaruhi inflasi. Penyediaan kedua komoditas tersebut diharapkan membantu warga memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari di tengah perubahan harga bahan pokok.

Pelayanan dilaksanakan secara bergiliran berdasarkan wilayah. Pada Selasa (13/10), Pasar Murah melayani masyarakat Kecamatan Batupoaro dan Sorawolio; Rabu (14/10) di Kecamatan Wolio; Kamis (15/10) di Kecamatan Kokalukuna dan Murhum; serta Jumat (16/10) di Kecamatan Betoambari, Bungi, dan Lea-lea.

Pemerintah juga membuka kesempatan berbelanja pada Sabtu (17/10) bagi warga yang belum sempat memanfaatkan pelayanan pada hari-hari sebelumnya. Pengaturan jadwal tersebut dimaksudkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan bersubsidi sekaligus menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.

Suarmawati mengatakan penyelenggara turut memperhatikan kenyamanan warga agar proses berbelanja tidak terkendala antrean panjang. "Tidak ada sistem antrean yang terlalu panjang sehingga mereka merasa nyaman untuk datang berbelanja," ujarnya.

Pasar Murah merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga pangan. Secara historis, Indonesia telah menjalankan kebijakan stabilisasi beras melalui pembentukan Badan Urusan Logistik (Bulog) pada 1967. Pada 1998, ketika krisis ekonomi menekan daya beli masyarakat dan harga beras melonjak, pemerintah juga menjalankan Operasi Pasar Khusus Beras yang kemudian berkaitan dengan program bantuan beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam perkembangannya, operasi pasar dan pasar murah tetap menjadi instrumen kebijakan pangan nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Februari 2022, misalnya, menjelaskan bahwa operasi pasar dan pasar murah dilakukan untuk menjaga pasokan, menstabilkan harga, serta membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Di Baubau, pemerintah berharap kegiatan serupa dapat meringankan pengeluaran rumah tangga dan mendukung pengendalian inflasi daerah.

Masyarakat diimbau memperhatikan jadwal pelayanan sesuai kecamatan masing-masing. Melalui distribusi layanan secara bertahap, Pemerintah Kota Baubau berharap kesempatan memperoleh bahan pangan dengan harga bersubsidi dapat dimanfaatkan secara lebih merata.(*)

Kabut Asap Selimuti Buton Selatan, Dinkes Bagaikan 400 Masker

matan Buton Selatan.

"Kepala Dinas Kesehatan sudah bersurat ke Puskesmas. Ada 14 Puskesmas yang ada di Buton Selatan akan membagikan masker," jelasnya.

Sri berharap, dengan pembagian masker masyarakat dapat terlindungi dari asap kabut yang mengelilingi Buton Selatan serta tidak terkena gejala ISPA seperti batuk pilek, demam, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, dan sesak napas.

"Apabila mengalami sesak napas, atau kesulitan bernapas, segera cari pertolongan medis, atau segera ke Puskesmas terdekat," ungkapnya.

Dinkes menghimbau selama kabut asap masih menyelimuti Buton Selatan diharapkan dapat menggunakan masker, terutama saat berada di tempat ramai, berdebu. Menghindari asap rokok dan debu, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara buruk.

"Mari bersama-sama menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan agar terhindar dari penyakit ISPA. Tetap waspada, terapkan pola hidup bersih dan sehat, serta jangan mengabaikan gejala gangguan pernapasan," tutup Sri.(*)

Persiapan Operasional RSUD Buton Tengah, Bupati Dr Azhari Bahas Kekurangan Fasilitas dengan Bappenas

mendapat penanganan sebelum operasional berjalan optimal.

Kunjungan tersebut berkaitan dengan agenda observasi lapangan untuk pengendalian Program Pembangunan Rumah Sakit (RS) Lengkap Berkualitas. Kegiatan itu mengacu pada surat Kementerian PPN/Bappenas Nomor T-23563/Dt.10.5/ME.02.01/10/2026 tertanggal 5 Oktober 2026. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai perkembangan program, mengidentifikasi risiko dan kendala, meninjau pelaksanaan rekomendasi, serta mempelajari praktik baik dalam pembangunan layanan rumah sakit.

Kesiapan RSUD Buton Tengah juga berkaitan dengan tantangan pemerataan akses kesehatan di daerah. Dalam konteks nasional, pengembangan fasilitas rumah sakit perlu disertai ketersediaan tenaga kesehatan, peralatan, obat-obatan, dan sistem pelayanan yang memadai agar pembangunan infrastruktur berujung pada manfaat nyata bagi pasien.

Secara internasional, penguatan layanan rumah sakit merupakan bagian dari agenda cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu harus tersedia bagi masyarakat tanpa menimbulkan kesulitan finansial. WHO juga menempatkan rumah sakit sebagai bagian penting dalam jejaring pelayanan kesehatan yang terintegrasi.

Dengan demikian, penyelesaian kekurangan fasilitas dan pembenahan tata kelola menjadi aspek penting dalam persiapan operasional RSUD Buton Tengah. Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan tersebut sehingga rumah sakit mampu menjalankan fungsi pelayanan secara profesional dan menjangkau kebutuhan kesehatan masyarakat setempat.(*)

BMKG Betoambari Peringatkan Potensi Kabut Asap di Baubau dan Sekitarnya hingga 17 Oktober

paikan bahwa hasil analisis prakiraan model komposisi atmosfer menunjukkan konsentrasi partikel halus atau Particulate Matter 2.5 (PM2.5) berada pada tingkat tinggi di Kota Baubau, Pasarwajo Kabupaten Buton, Labungkari Kabupaten Buton Tengah, dan Batauga Kabupaten Buton Selatan pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh angin yang relatif lemah dari arah timur hingga tenggara pada dini hari sampai pagi, bersamaan dengan tingginya kepekatan asap di berbagai lapisan atmosfer.

Berdasarkan prakiraan, konsentrasi PM2.5 pada 13 Oktober telah mencapai kisaran 53-59 mikrogram per meter kubik (µg/m³) sejak pukul 02.00 WITA. Angka tersebut diprakirakan meningkat hingga 70-72 µg/m³ pada pukul 08.00-11.00 WITA, sebelum berangsur menurun ketika angin dari selatan hingga tenggara menguat pada siang hari.

Pada pukul 23.00 WITA, konsentrasi PM2.5 diprakirakan turun menjadi sekitar 22-28 µg/m. Puncak tertinggi diprakirakan terjadi di Pasarwajo, Kabupaten Buton, dengan nilai mencapai 71,6 µg/m³ pada pukul 08.00 WITA.

BMKG memprakirakan kondisi udara di wilayah tersebut akan membaik pada 14-15 Oktober 2026. Konsentrasi PM2.5 diperkirakan berada pada kisaran 9-29 µg/m³, meskipun masih terdapat kenaikan dalam waktu singkat pada pagi hari.

Namun, masyarakat diminta tidak lengah. Konsentrasi partikel halus diprakirakan kembali meningkat mulai malam 16 Oktober dan bertahan pada kisaran 35-51 µg/m³ sepanjang 17 Oktober hingga data prakiraan pukul 20.00 WITA.

Peningkatan tersebut diperkirakan berkaitan dengan kondisi angin yang relatif lemah dari arah timur laut hingga timur, terutama pada malam sampai dini hari, sehingga penyebaran partikel di udara berpotensi kurang optimal.

BMKG juga mencatat bahwa kepekatan asap di seluruh lapisan atmosfer, yang digambarkan melalui parameter Aerosol Optical Depth (AOD), mencapai nilai tertinggi pada 13 Oktober pukul 05.00 WITA, yakni sekitar 1,62-1,66 di empat wilayah tersebut.

Nilai itu menunjukkan kondisi atmosfer yang cukup pekat oleh aerosol dan memungkinkan langit tampak berasap. Kepekatan kemudian diprakirakan menurun hingga sekitar 0,22 pada 15 Oktober, sebelum kembali meningkat menjadi 0,71-0,72 pada 17 Oktober pukul 05.00 WITA.

Dalam keterangannya, BMKG menjelaskan bahwa nilai PM2.5 dalam prakiraan tersebut merupakan konsentrasi sesaat setiap tiga jam, sehingga tidak dapat langsung disamakan dengan kategori Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang menggunakan konsentrasi rata-rata 24 jam.

Meski demikian, pada 13 Oktober, konsentrasi sesaat di empat wilayah tersebut diprakirakan melampaui 55,5 µg/m³ pada beberapa waktu pengamatan berturut-turut. Kondisi ini menjadi perhatian karena partikel halus dapat berdampak terhadap kesehatan, terutama bagi kelompok rentan.

BMKG mengimbau anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan dan penyakit jantung untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, khususnya pada 13 Oktober sejak dini hari hingga sore, sekitar pukul 02.00-17.00 WITA, serta pada malam 16 Oktober hingga 17 Oktober.

Masyarakat umum juga disarankan mengurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan. Apabila udara terlihat berasap, warga dianjurkan menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut secara rapat. Masker jenis N95 atau KN95 dinilai lebih efektif dalam menyaring partikel halus.

Warga yang mengalami sesak napas, batuk berkepanjangan, atau nyeri dada diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan.

Selain langkah perlindungan kesehatan, masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran sampah, jerami, maupun lahan yang dapat memperburuk kualitas udara.(*)

Baiubai BAUBAU
On Heart Of Buton Land
485 KOTA BAUBAU
KERJ BERSAMA

PEMERINTAH KOTA BAUBAU
MENGUCAPKAN
SELAMAT
HUT BAUBAU KE 485
DAN
HARI JADI KOTA BAUBAU KE 25
SEBAGAI DAERAH OTONOM
BAUBAU 17 OKTOBER 2026

WALI KOTA BAUBAU
H YUSRAN FAHIM, SE

WAKIL WALIKOTA BAUBAU
Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc